

ANALISIS FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN-KECAMATAN DI BAGIAN TIMUR KABUPATEN KONAWE SELATAN

¹Didi Setiawan, ²Zainuddin Saenong, dan ³Ulfa Matoka
¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo
^{2,3}Staf Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo
Email: didiiesp11@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to: (1) identify and analyze the services functions of eastern of South Konawe Regency, (2) identify and analyze the degree of interaction between the district in eastern of South Konawe. Methods of collecting data is documentation of secondary data for 2015 period. The analyzed data used Schallogram and Gravity analysis. The results showed that the Ranomeeto district is in first hierarchy, besides that Konda district in the second. Konda and Moramo district have broader services and reach the three of the seven districts in the eastern of South Konawe as a result more populous and close distance.

Keywords: *interaction, services, distance*

1. Pendahuluan

Daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Daerah otonom harus berusaha dan mampu mengoptimalkan berbagai sumberdaya wilayah yang tersedia agar berfungsi sebagai kekuatan utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya menyelenggarakan perkembangan dan pertumbuhan wilayah telah menempuh kebijakan spasial dengan mengklasifikasikan daerah Sulawesi Tenggara atas tiga satuan perwilayahan pembangunan seperti yang tertuang dalam pola dasar rencana struktur tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada dasarnya pengembangan pusat pertumbuhan merupakan pusat kegiatan untuk mempercepat pola tata kawasan dan pola jaringan di pedesaan serta memperkuat mekanisme yang sudah ada dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah ada. Jadi dengan adanya kawasan pusat-pusat pertumbuhan di harapkan dapat mendorong perkembangan daerah-daerah yang ada di sekitarnya (*hinterland*).

Distribusi dan fasilitas pelayanan, sebagai fungsi dari tata ruang wilayah adalah krusial bukan hanya untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai pemerataan sosial dan kualitas hidup. Kesenjangan dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial sering di ukur melalui jumlah dan keanekaragaman fungsi-fungsi produktif dan sosial yang berkolaborasi dalam suatu komunitas atau wilayah. Ketimpangan pertumbuhan antara kelompok-kelompok dan paling miskin di bangsa-bangsa sedang berkembang dapat di tandai secara luas pada perbedaan-perbedaan dalam akses terhadap aktifitas produktif dan jasa sosial (Bank Dunia *dalam* Rondinelli, 1985).

Kabupaten Konawe Selatan merupakan bagian dari wilayah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk melihat perbedaan pembangunan wilayah di

Kabupaten Konawe Selatan pemerintah berusaha menjabarkan dalam suatu kebijaksanaan daerah yang merangkum berbagai aspek, guna menciptakan stabilitas ekonomi yang baik serta pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan di berbagai sektor. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan di bentuk wilayah yang termuat dalam Perda No. 19 Kabupaten Konawe Selatan, RTRW 2013-2033 yang terdiri dari:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan, yaitu yang berpusat di Andoolo.
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa, yaitu tersebar di Tinanggea, Konda, Kolono, Lalembuu, Laeya, Ranomeeto, Mowila, dan Moramo.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani skala antar desa, Baito, Laonti, Basala, Benua, Angata, Buke, Wolasi, Palangga Selatan, Palangga, Moramo Utara, Lainea, Ranomeeto- Barat, dan Landono.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan perkembangan jumlah penduduk ikut berperanserta dalam mendorong pembangunan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, khususnya di Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe selatan, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun perkembangan jumlah penduduk tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Perkembangan Jumlah Penduduk di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tahun (Jiwa)				
		2010	2011	2012	2013	2014
Konda	132,84	18.131	18.464	18.739	19.112	19.861
Ranomeeto	96,57	16.223	16.573	17.068	17.325	17.770
Wolasi	160,28	4.730	48.15	4.885	5.016	5.181
Kolono	467,38	13.602	13.931	14.091	14.425	14.899
Laonti	406,63	9.444	9.615	9.714	9.915	10.345
Moramo	237,89	12.976	13.225	13.367	13.761	14.213
Moramo utara	189,05	7.741	7.362	7.504	7.608	7.858

Sumber: BPS (2015)

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Konda memiliki jumlah penduduk yang terbanyak yaitu 19.861 Jiwa dengan luas wilayah 132,84 Km², kondisi tersebut telah memposisikan Kecamatan Konda sebagai calon Ibu Kota Kabupaten. Namun demikian beberapa kecamatan seperti Ranomeeto, Kolono, Moramo dan Laonti menunjukkan perkembangan penduduk yang signifikan. Kondisi tersebut menuntut kemungkinan dalam kurun waktu yang akan datang Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan dapat berkembang menjadi suatu wilayah pengembangan tersendiri. Perroux (dalam Adisasmita, 2014) menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi disemua wilayah, akan tetapi terbatas pada beberapa tempat tertentu dengan variabel yang berbeda-beda intensitasnya. Keberhasilan pembangunan yang terjadi di pusat pertumbuhan akan disebarkan ke daerah-daerah sekitarnya yang sesuai dengan konsep Hirschman yaitu dampak tetesan

kebawah (*tricking-down effect*) atau konsep Myrdral yaitu dampak penyebaran (*spread effect*).

Pusat-pusat pelayanan di Ibukota Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan memperlihatkan fungsi yang berbeda-beda yang mana pusat pelayanan di Kecamatan Konda dan Kecamatan Kolono sudah bertindak sebagai tempat sentral bagi populasi yang berada di dalam maupun di sekitar pemukiman, sedangkan pusat-pusat pelayanan di empat Kecamatan yaitu Wolasi, Laonti, Moramo, dan Moramo Utara belum memperlihatkan fungsi atau peran sebagai tempat sentral bagi populasi yang berada dalam unit-unit pemukiman desa sekitarnya. Pusat pelayanan yang teletak di ibukota Kecamatan Ranomeeto telah cenderung memiliki fasilitas yang beragam, hal ini karena kecamatan tersebut merupakan daerah pemukiman tertua. Berdasarkan fenomena ini, maka penting untuk mengetahui bagaimana fungsi pelayanan kecamatan-kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan, dan bagaimana tingkat interaksi antar kecamatan-kecamatan yang ada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan.

2. Kajian Literatur

Teori Tempat Sentral (Central Palace Theory)

Lincoln Arsyad (1999) menjelaskan bahwa Teori Tempat Sentral (*Central Place Theory*) memiliki pandangan bahwa ada hirarki tempat (*hirarcy of place*) di setiap wilayah atau daerah. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang bersangkutan. Teori tempat sentral ini dapat diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan diferensiasi fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah dapat menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan daerah lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah.

Teori Simpul Jasa Distribusi

Teori simpul jasa distribusi berpijak pada hasil pengenalan atau faktor penentu lokasi "kemudahan". Hadjisarosa menjelaskan konsepnya bahwa berkembangnya wilayah di tandai oleh terjadinya pertumbuhan atau perkembangan sebagai akibat berlangsungnya berbagai kegiatan usaha, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan. Berlangsungnya kegiatan tersebut di tunjang oleh pertumbuhan modal. Pengembangan sumberdaya tersebut berlangsung sedemikian sehingga menimbulkan arus barang. Arus barang di anggap sebagai salah satu gejala ekonomi yang paling menonjol, arus barang merupakan suatu wujud fisik perdagangan antar daerah, antar pulau, ataupun antar Negara. Arus barang didukung langsung oleh jasa perdagangan dan jasa pengangkutan (jasa distribusi). Jadi jasa distribusi dan pembangunan secara fisik merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama jika di tinjau pengaruhnya dalam penentuan lokasi tempat berkelompoknya berbagai kegiatan usaha dan kemudahan-kemudahan sehingga dapat berfungsi sebagai proses berkembangnya wilayah (Adisasmata, 2008).

Konsep Ruang dan Wilayah

H.R Mulyanto (2008) mengemukakan ruang berupa bentangan geografi dengan batas-batas jelas beserta infrastruktur didalamnya dengan udara di atasnya sesuai yang diakui secara hukum yang beraku. Jadi wujud ruang di permukaan bumi berbentuk tiga dimensi yaitu bentangan horizontal berupa daratan dan perairan serta bentangan vertical berupa lapisan udara di atasnya. Menurut Hanafiah dalam Sasya Danastri (2011), unsur-unsur ruang yang terpenting adalah, (1) Jarak; (2) Lokasi; (3) Bentuk dan (4) Ukuran atau skala. Artinya, setiap wilayah harus memiliki keempat unsure di atas. Unsur diatas bersama-sama membentuk/menyusun suatu unit ruang yang disebut wilayah yang dapat dibedakan dari wilayah lain. Glasson dalam Tarigan (2009) mengatakan wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isinya (*homogeneity*) misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah belakangnya, lokasi produksi dan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, hierarki jalur transportasi, dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan satuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya dan batas dan sistemnya di tentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, dkk. (2006) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-bats sepsifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut di mana satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batas wilayah tidak selalu bersifat fisik dan bersifat pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di batasan unit geografis tertentu.

Glasson dalam Tarigan (2009) mengemukakan bahwa ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah. Yaitu subjektif dan objektif. Cara pandang subjektif yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Pandangan objektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam di setiap wilayah. Wilayah dapat dibedakan berdasarkan musim/temperatur yang dimilikinya, atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, dan kepadatan penduduk.

Konsep Kecamatan Sebagai Pusat Pelayanan

Dusseldrop (Padangarang, 2008) mengemukakan bahwa salah satu faktor penting dalam pembangunan wilayah adalah aspek ruang yaitu suatu yang tepat dari suatu fasilitas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Teori pusat pelayanan (*central palace theory*) yang di kemukakan oleh craistaller di defenisikan sebagai suatu kesatuan unit dasar pemukiman dengan di lengkapi pusat-pusat pelayanan di dalamnya. Unit pemukiman yanga di maksud dapat berupa suatu kota besar, kota-kota kecil, wilayah kota atau satuan lingkungan hunian tertentu. Cirri dari pusat pelayanan adalah bahwa pusat tersebut menyediakan pelayanan (komoditas dan jasa) untuk wilayah pemukiman itu sendiri dan daerah sekitarnya yang lebih besar (Daljoeni, 1997)

Menurut *United Nation* (1978), Hirarki pusat pelayanan akan mempengaruhi fungsi kota. Hirarki tersebut terdiri beberapa tipe sesuai dengan indikator ketersediaan fasilitas pelayanan. Di antaranya tipe *district town* yang merupakan pusat terbesar dari *rural* (pedesaan) yang merupakan lokasi pusat pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan kenyamanan dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Sedangkan *locality towns* merupakan lokasi penyedia kebutuhan dasar sehari-hari, dan pelayanan kesehatan untuk pencegahan.

Dusseldrop (Padangarang, 2008) mengemukakan bahwa masalah fasilitas pelayanan baik yang menyangkut lokasi maupun kualitas dan jumlahnya, erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika fasilitas pelayanan tidak tersedia dengan baik. Jadi fasilitas pelayanan dapat di anggap sebagai faktor potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah baik perkotaan maupun perdesaan sehingga upaya peningkatan pembangunan kegiatan ekonomi harus terus ditingkatkan terutama di suatu wilayah.

Fasilitas pelayanan dapat dikelompokkan menurut fungsi yang sangat berguna bagi seluruh kebudayaan, baik dalam kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial. Kebudayaan yang dimaksud disini adalah kehidupan dalam arti luas. Dalam kegiatan sosial ekonomi terdapat suatu istilah yaitu ambang yang berarti jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk menunjang supaya suatu fungsi tertentu dapat berjalan lancar. Misalnya suatu macam pelayanan yang lebih tinggi fungsinya, atau yang diperlukan oleh jumlah penduduk yang besar jumlahnya (pasar, sekolah menengah dan sebagainya), harus terletak di wilayah jangkauan pelayanan yang lebih luas. Fasilitas budaya tersebut dapat dibedakan menurut fungsinya dalam dua kelompok, yaitu :

1. Pelayanan sosial (yang berbentuk jaringan dan berbentuk ruang/bangunan) terdapat dalam kegiatan : kekeluargaan, pemerintahan, agama, kesehatan, pendidikan, rekreasi, jaminan/bantuan sosial, pertahanan dan keamanan, perhubungan dan komunikasi, informasi dan data.
2. Pelayanan ekonomi (yang terbentuk jaringan atau ruang/bangunan) terdapat dalam kegiatan: pertanian/perkebunan/kehutanan, industri, konstruksi bangunan, pariwisata dan perhotelan, perdagangan dan perusahaan jasa lain, perhubungan dan komunikasi serta informasi dan data.

Penelitian Sebelumnya

Herman (2004) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Interaksi Sosial Ekonomi Antara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial ekonomi masyarakat antar desa atau kelurahan di Kecamatan Pasar Wajo di lakukan melalui proses timbal-balik. Kecamatan Pasar Wajo sebagai ibukota kabupaten telah memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi masyarakat desa/kelurahan sekitarnya.

Dita Hestudiputri (2007) dengan penelitiannya yang berjudul “Peran dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Rembang” menunjukkan (1) analisis wilayah pengaruh dan analisis interaksi pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya menunjukkan bahwa peran IKK (Ibu Kota Kecamatan) Lasem sebagai pusat pertumbuhan telah mamapu menjadi penarik bagi pusat pertumbuhan di Kabupaten Rembang, (2) dengan adanya kegiatan perkotaan di IKK Lasem yang didukung oleh aksesibilitas yang tinggi antara IKK Lasem dan daerah belakangnya membawa pengaruh dan membuat peran IKK Lasem sebagai pusat pertumbuhan terpenuhi, (3) berdasarkan hasil analisis IKK Lasem telah mempunyai

pelayanan fasilitas yang lengkap dengan jangkauan fungsi dan pelayanan yang luas dari mulai kecamatan hingga kabupaten (terutama fasilitas transportasi) sehingga fungsi IKK Lasem sebagai pusat pertumbuhan telah terpenuhi, (4) IKK Lasem memiliki potensi untuk dikembangkan lebih, melihat posisinya yang strategis. Sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan skunder yang bersumber dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Kecamatan, desa/kelurahan setempat serta instansi terkait lain. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis Skalogram dan Gravitasi. Analisis skalogram digunakan untuk menjawab permasalahan pertama yaitu berapa besar fungsi pelayanan pada Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Analisis gravitasi digunakan untuk menjawab permasalahan ke dua yaitu berapa besar tingkat interaksi antar Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan besarnya jarak antar pusat pelayanan (kecamatan) dan data jumlah penduduk dengan asumsi, semakin banyak jumlah penduduk suatu Kecamatan serta semakin dekat jarak dengan Kecamatan lainnya, maka semakin besar daya tarik Kecamatan tersebut dan semakin tinggi pula tingkat interaksinya dengan Kecamatan lain.

Penentuan wilayah pengaruh menggunakan teori gravitasi menggunakan rumus (Warpani, 1984:113) :

$$I_{12} = \frac{P_1 P_2}{(d_{12})^2}$$

Keterangan:

- I_{12} = Interaksi antara kecamatan 1 dengan kecamatan 2 (indeks gravitasi)
- P_1 = Jumlah penduduk pada wilayah pertama (ribuan jiwa)
- P_2 = Jumlah penduduk pada wilayah kedua (ribuan jiwa)
- d_{12} = Jarak ibukota kecamatan 1 dengan kecamatan 2 (km)

Perhitungan seberapa jauh jarak batas gaya tarik suatu pusat yang menggambarkan jangkauan pelayanan terhadap pusat lainnya menggunakan elaborasi rumus gravitasi sebagai berikut:

$$D_{AB} = \frac{q_{AB}}{1 + \sqrt{\frac{P_A}{P_B}}}$$

Dimana :

- D_{AB} = Jarak batas gaya tarik dari pusat A ke pusat B (Km)
- d_{AB} = Jarak ibu kota kecamatan A ke kecamatan B (Km)
- P_A = Jumlah penduduk pusat A (ribuan jiwa)
- P_B = Jumlah penduduk pusat B (ribuan jiwa)

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Fungsi Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan

Hasil penelitian memberikan informasi bahwa ada 3 (tiga) jenis fasilitas yang di jadikan indikator dalam menentukan besarnya fungsi pelayanan kecamatan namun tidak terdapat pada seluruh kecamatan yang berada di bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan yaitu Radio swasta, PDAM dan Media Cetak. dengan demikian jumlah fasilitas pelayanan yang di jadikan indikator yang tadinya 26 (duapuluh enam) fasilitas sehingga menjadi 23 (duapuluh tiga) jenis fasilitas pelayanan.

Tabel 2 Hasil Tabulasi Skalogram Fasilitas Pelayanan Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Fasilitas	Hirarki
1	Ranomeeto	17.770	21	I
2	Konda	19.861	19	II
3	Moramo	14.213	18	III
4	Kolono	14.899	16	IV
5	Mor. Utara	7.858	13	V
6	Wolasi	5.181	10	VI
7	Laonti	10.345	8	VII

Sumber: Hasil olahan data skalogram

Kecamatan Ranomeeto dengan jumlah penduduk 17.770 Jiwa dengan luas wilayah 96,57 Km² berada pada hirarki I (pertama) dengan jumlah fasilitas lebih besar yaitu sebanyak 21 fasilitas pelayanan yang di jadikan indikator besarnya fungsi pelayanan kecamatan. Dengan demikian secara hirarki Kecamatan Ranomeeto merupakan pusat orientasi pelayanan masyarakat di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Penyebaran fasilitas pelayanan pada setiap kecamatan menggambarkan kemampuan kecamatan dalam pengembangan wilayah tersebut. Hal ini di sebabkan semakin besar fungsi pelayanan yang dicapai setiap kecamatan maka semakin besar orientasi geografis penduduk untuk memperoleh pelayanan, atau semakin besar daya tarik geografis kecamatan tersebut terhadap daerah sekitarnya dan semakin besar keterkaitan pelayanan yang terjadi.

Berdasarkan tabel diatas, kondisi yang berbeda terjadi di Kecamatan Laonti dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan yaitu 10,345 Jiwa, dari 23 (dua puluh tiga) kategori jenis fasilitas pelayanan hanya memiliki sejumlah 8 (delapan) jenis fasilitas pelayanan. Jika di dibandingkan dengan Kecamatan Moramo Utara dan Wolasi yang masing-masing memiliki jumlah penduduk 7.858 dan 5.181 Jiwa, meskipun memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil dari pada Kecamatan Laonti tetapi fasilitas yang ada di kecamatan tersebut lebih besar keberadaanya. Hal tersebut memberi gambaran bahwa betapa lemahnya kecamatan tersebut untuk berkembang. Artinya bahwa daya dukung penduduk dalam pengembangan wilayah di kecamatan tersebut tidak mampu memberikan daya pengembangan pada wilayah tersebut. Oleh sebab itu di perlukan upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk mendorong pertumbuhan modal

distribusi barang dan jasa untuk berbagai aktifitas penduduk dalam pengembangan wilayah tersebut.

Fungsi Kecamatan Berdasarkan Sentralitas Fasilitas Pelayanan

Berdasarkan hasil perhitungan indeks sentralitas terbobot diperoleh informasi bahwa ada 1 (satu) jenis fasilitas yang memiliki nilai bobot 100, yaitu tempat karaoke/studio musik yang merupakan fasilitas jasa perorangan yang hanya ada di Kecamatan Ranomeeto. Sedangkan fasilitas pelayanan yang memiliki nilai bobot 50 adalah Penginapan, salon kecantikan serta PPAT fasilitas jasa perorangan lain yang hanya ada di Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Konda. Fasilitas pelayanan seperti pasar tradisional, toko/kios, puskesmas, lapangan sepak bola, bengkel mobil/motor, foto copy, koperasi yaitu tersebar merata di setiap kecamatan di wilayah penelitian. Hasil perhitungan indeks sentralitas terbobot di sajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Tabulasi Indeks Sentralitas Pelayanan Kecamatan-Kecamatan Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	IST	Hirarki
1	Ranomeeto	17.770	537,8	I
2	Konda	19.861	437,8	II
3	Moramo	14.213	237,8	III
4	Kolono	14.899	237,8	III
5	Mor. Utara	7.858	187,8	IV
6	Wolasi	5.181	147,8	V
7	Laonti	10.345	114,4	VI

Sumber: Hasil olahan data Skalogram

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki skor kedua tertinggi adalah Kecamatan Konda dengan nilai skor 437,8 kemudian di ikuti oleh Kecamatan Moramo dan Kolono dengan nilai skor 237,8 kecamatan-kecamatan tersebut memiliki fasilitas pelayanan untuk kegiatan ekonomi yaitu pasar, toko bahan pertanian, toko bahan bangunan, dan industri. Artinya kecamatan-kecamatan ini berpotensi sebagai pusat yang efisien bagi pertumbuhan modal dalam pengembangan wilayah di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Kecamatan Moramo Utara, Wolasi, dan Laonti merupakan kecamatan-kecamatan yang mempunyai skor terendah dibanding kecamatan-kecamatan lainya secara berturut-turut nilai skor untuk masing-masing kecamatan adalah (187,8; 147,8; dan 114,4).

Rendahnya skor kecamatan-kecamatan tersebut di sebabkan karena fasilitas pelayanan yang ada di masing-masing kecamatan tersebut juga tersebar merata di kecamatan-kecamatan lainya. Namun demikian tidak berarti bahwa kecamatan-kecamatan tersebut tidak mempunyai kemampuan (potensi) untuk lebih berkembang di banding dengan kecamatan yang memiliki skor tertinggi. Sebagai contoh, Kecamatan Laonti merupakan kecamatan yang memiliki skor paling rendah tetapi kecamatan tersebut mempunyai potensi perikanan, perkebunan dan kehutanan yang cukup besar untuk dikembangkan. Untuk itu di perlukan upaya-upaya dan langkah yang konkrit dari pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan modal distribusi barang dan jasa untuk berbagai aktifitas penduduk dalam pengembangan wilayah tersebut.

Analisis Interaksi Antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan Interaksi Geografis

Tabel 4 Interaksi Antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan

No	Antar Kecamatan				Jarak (Km) = (D)	Interaksi = (I)
	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa) = (Pi)	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa) = (Pj)		
1	Konda	19.861	Ranomeeto	17.770	16,9	1.235.706
			Wolasi	5.181	16,2	392.089
			Kolono	14.899	70,8	59.033
			Laonti	10.345	65,0	48.630
			Moramo	14.213	39,1	184.643
			Mor. Utara	7.858	29,7	176.929
2	Ranomeeto	17.770	Konda	19.861	16,9	1.235.706
			Wolasi	5.181	33,1	84.032
			Kolono	14.899	87,7	34.423
			Laonti	10.345	81,9	27.406
			Moramo	14.213	56,0	80.537
			Mor. Utara	7.858	46,6	64.302
3	Wolasi	5.181	Konda	19.861	16,2	392.089
			Ranomeeto	17.770	33,1	84.032
			Kolono	14.899	78,7	12.463
			Laonti	10.345	74,0	9.788
			Moramo	14.213	47,7	32.364
			Mor. Utara	7.858	37,6	28.797
4	Kolono	14.899	Konda	19.861	70,8	59.033
			Ranomeeto	17.770	87,7	34.423
			Wolasi	5.181	78,7	12.463
			Laonti	10.345	58,7	44.731
			Moramo	14.213	31,7	210.729
			Mor. Utara	7.858	60,8	31.671
5	Laonti	10.345	Konda	19.861	65,0	48.630
			Ranomeeto	17.770	81,9	27.406
			Wolasi	5.181	74,0	9.788
			Kolono	14.899	58,7	44.731
			Moramo	14.213	27,0	201.692
			Mor. Utara	7.858	56,1	25.830
6	Moramo	14.213	Konda	19.861	39,1	184.643
			Ranomeeto	17.770	56,0	80.537
			Wolasi	5.181	47,7	32.364
			Kolono	14.899	31,7	210.729
			Laonti	10.345	27,0	201.692
			Mor. Utara	7.858	29,1	131.890
7	Mor. Utara	7.858	Konda	19.861	29,7	176.929
			Ranomeeto	17.770	46,6	64.302
			Wolasi	5.181	37,6	28.797
			Kolono	14.899	60,8	31.671
			Laonti	10.345	56,1	25.830
			Moramo	14.213	29,1	131.890

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil perhitungan matriks jarak dan jumlah penduduk kecamatan-kecamatan yang berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan yaitu Konda, Ranomeeto, Wolasi, Kolono, Laonti, Moramo, dan Moramo Utara secara geografis dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan perhitungan Tabel 4 di peroleh gambaran bahwa interaksi tertinggi terjadi antara Kecamatan Konda dengan Kecamatan Ranomeeto yaitu sebesar 1.235.706. Tingginya interaksi ini terjadi di pengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang cukup besar dan jarak yang cukup dekat yaitu 16,9 Km. Kuatnya interaksi ini ditunjang pula dengan ketersediaan fasilitas pelayanan yang ada, dimana Kecamatan Ranomeeto mempunyai fasilitas yang lebih tinggi keberadaanya di banding Kecamatan

Konda Terutama fasilitas pelayanan seperti bank, terminal dan studio musik. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan Indeks Sentralitas Terbobot dimana Kecamatan Ranomeeto mempunyai skor yang lebih tinggi yaitu 537,8 sedangkan Kecamatan Konda mempunyai skor 437,8.

Interaksi yang besar kedua terjadi pada Kecamatan Konda dengan Kecamatan Wolasi yaitu sebesar 392.089. kuatnya hubungan ini di pengaruhi oleh dekatnya jarak tempuh dari Kecamatan Konda ke Kecamatan Wolasi 16,2 Km. Begitu juga yang terjadi dengan Kecamatan Moramo dengan Kecamatan Kolono memiliki interaksi yang cukup kuat yaitu 210.729. kuatnya hubungan antar kedua kecamatan tersebut di pengaruhi dengan besarnya jumlah penduduk dan jarak tempuh yang cukup dekat yaitu 31,7 Km. Kuatnya interaksi yang terjadi antara kedua kecamatan ini didukung pula oleh ketersediaan fasilitas pelayanan, dimana Kecamatan Moramo dan Kecamatan Kolono dalam hal Fasilitas pelayanan, ini di buktikan dengan nilai IST yang sama yaitu 237,8.

Interaksi yang rendah terjadi pada Kecamatan Kolono dengan Kecamatan Wolasi yaitu sebesar 12.463. Rendahnya interaksi yang terjadi antara ke dua kecamatan tersebut di sebabkan karena faktor jarak yang relatif cukup jauh yaitu dengan jarak tempuh 78,7 Km. Serta interaksi yang paling rendah terjadi pada Kecamatan Wolasi dan Kecamatan Laonti yaitu sebesar 9.788. Rendahnya interaksi ini disebabkan karena jarak tempuh ke dua kecamatan tersebut yang cukup jauh yaitu 74,0 Km. Demikian pula hubungan yang tidak langsung juga terjadi pada kedua kecamatan tersebut. Sebab bila dari pusat Kecamatan Wolasi ke pusat Kecamatan Laonti harus melewati Kecamatan Moramo terlebih dahulu. Sedangkan jika di dibandingkan dengan Kecamatan Wolasi, Kecamatan Moramo lebih memiliki fasilitas yang cukup beragam, jika berdasarkan kompleksitas/keberadaan fasilitas pelayanan kedua kecamatan tersebut itu di tunjukan dengan Indeks Sentralitas Terbobot (IST) kedua kecamatan tersebut yang tergolong sangat rendah di dibandingkan dengan kecamatann lainnya, yaitu skor untu Kecamatan Wolasi yaitu 147,8 dan Kecamatan Laonti 114,4.

Tabel 5 Matriks Batas Gaya Tarik Geografis Antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015

N0	Kecamatan	Jumlah penduduk	Jarak antar Kecamatan							Jarak Rata-rata
			Konda	Ranomeeto	Wolasi	Kolono	Laonti	Moramo	Mor. Utara	
1	Konda	19.861	0	8,69	10,72	37,94	37,75	21,18	18,23	19,22
2	Ranomeeto	17.770	8,21	0	21,49	45,78	46,45	29,56	27,99	24,47
3	Wolasi	5.181	5,48	11,61	0	29,19	30,67	17,96	16,85	15,97
4	Kolono	14.899	32,86	41,92	49,51	0	32,02	16,04	35,22	29,65
5	Laonti	10.345	27,25	35,45	43,33	26,68	0	12,43	29,97	25,02
6	Moramo	14.213	17,92	26,44	29,74	15,66	14,57	0	16,69	17,29
7	Mor. Utara	7.858	11,47	18,61	20,75	25,58	26,13	12,41	0	16,42

Sumber: Data yang di olah

Berdasarkan data jumlah penduduk dan jarak antar kecamatan serta dihitung dengan menggunakan elaborasi rumus gravitasi sehingga dapat dihitung batas gaya tarik geografis antar kecamatan, yang disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 maka

dapat di ketahui bahwa Kecamatan Konda dan Kecamatan Moramo memiliki jangkauan pelayanan secara geografis meliputi 3 (tiga) kecamatan. Artinya secara geografis Kecamatan Konda dan Kecamatan Moramo memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas terhadap kecamatan-kecamatan lainnya khususnya di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan, Jangkauan pelayanan Kecamatan Konda mencapai radius jarak rata-rata 19,22 Km, menjangkau sampai Kecamatan Ranomeeto, Kecamatan Wolasi, dan Kecamatan Moramo Utara dan Kecamatan Moramo mencapai radius jarak rata-rata 17,29 Km, menjangkau sampai Kecamatan Moramo Utara, Laonti, dan Kolono. Sedangkan kecamatan yang paling rendah batas gaya tarik geografisnya adalah Kecamatan Kolono dan Laonti yang hanya mampu menjangkau sampai Kecamatan Moramo dengan radius jarak rata-rata 29,65 dan 25,02 Km. Artinya kecamatan tersebut bila berdasarkan batas gaya tarik geografisnya hanya mampu melayani penduduk di wiayah tersebut.

5. Simpulan

1. Kemampuan Fungsi pelayanan sosial ekonomi kecamatan-kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa Kecamatan Ranomeeto berada pada hrarki pertama, di ukur dari penyebaran jumlah dan keragaman fasilitas pelayanan. Sedangkan Kecamatan Konda, Moramo, Kolono, Moramo Utara, Wolasi dan Laonti masing-masing berada pada hirarki kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam.
2. Tingkat interaksi antar kecamatan-kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa Kecamatan Konda dan Kecamatan Moramo memiliki jangkauan pelayanan lebih luas karena dapat menjangkau sejumlah tiga kecamatan dari tujuh kecamatan yang berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan, hal tersebut di dominasi karena jumlah penduduk yang banyak dan keterdekatan jarak antar pusat ibukota kecamatan sehingga gaya tarik wilayahnya tinggi. Ditinjau dari Pusat pelayanannya Kecamatan Ranomeeto sebagai pusat utama yaitu dengan IST tertinggi. Kecamatan Konda sebagai pusat utama berdasarkan IST urutan kedua dan jangkauan pelayanan yang lebih luas di dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo, 2005. Dasar-dasar ekonomi wilayah. Penerbit Geraha Ilmu. Yogyakarta
- Arsyad, lincolin. 1999 Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2015
- Bintarto, R. 1997. Interaksi Desa/Kota Dan Permasalahanya, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Budiharsojo, Sugeng, 2001. Perencanaan Pembangunan Wilayah: Teori Model Dan Perencanaan Wilayah.
- Depdikbud. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Lembaga Penerbit, Jakarta : FE UI.
- Herman, 2004. *Analisis Interaksi Sosial Ekonomi Antara Desa Kelurahan Di Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton*. Skripsi FE Universitas Halu Oleo program sarjana Tidak Diterbitkan.

- Hestudiputri, Dita (2007). *Peran dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Rembang*. Skripsi Universitas Negri Sumatra Utara.
- Hizaruddin, La Ode, 2014. *Analisis Fungsi Pelayanan Kecamatan Kulisusus Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Buton Utara*. Skripsi FE Universitas Halu Oleo program sarjana Tidak Diterbitkan.
- Kamaludindin, Rustian, 1993. *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional Dan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahi, La. 2009, *Analisis Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Pada Perwilayahan Pembangunan Di Kabupaten Muna*. (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo; Kendari.
- Matoka, Ulfa. 1994. *Studi Jangkauan Pelayanan Pusat-Pusat Pertumbuhan di Sulawesi Tenggara*. (Tesis, Program Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Pasca Sarjana UNHAS, tidak di publikasikan).
- Misriatun, 2009. *Analisis Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Kolaka Bagian Timur*.(Tesis, Program Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Pasca Sarjana Universitas Haluoleo, tidak dipublikasikan.
- Mulyanto, H.R. 2008. *Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Geraha.
- Nas, PJM, 1999. *Kota di Dunia Ketiga*, Jakarta: Bharata.
- Nurjanah. 2006. *Studi Pengembangan Wilayah Kecamatan Sorawolio Sebagai Sub Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Bau-Bau*. Skripsi FE Universitas Halu Oleo: Kendari
- Padangarang, 2008. *Teknik Analisis Kuantitatif Wilayah*. Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syamsul, La Ode. 2013. *Analisis Fungsi Kecamatan di Bagian Barat Kabupaten Muna*. (Tesis, Program Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Pasca Sarjana Universitas Haluoleo, tidak dipublikasikan.
- Taringan, R. 2006, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta PT Bumi Aksara.
- Undang-undang. 1999. *Undang-Undang Nomor 22, Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah*.
- Warpani, S. 1984, *Analisa kota dan Daerah*, Penerbit ITB: Bandung
- _____, 2008. *Pengembangan Wilayah Konsep Dan Teori*. Penerbit Geraha Ilmu. Yogyakarta